APBD - KOTA PANGKALPINANG

2025

PERDA KOTA PANGKALPINANG NO. 13 , LD 2024/NO.57, 17 HLM

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Abstrak

Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Walikota Pangkalpinang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 27 Tahun 2000, UU No.17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, UU No.29 Tahun 2024, UU No. 62 Tahun 2024, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012, PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2018, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 37 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 78 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2024, PERDA Kota Pangkal Pinang No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 2 Tahun 2024, PERDA Kota Pangkal Pinang No.12 Tahun 2022, dan PERDA Kota Pangkal Pinang No. 1 Tahun 2024.

Dalam peraturan ini mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memuat tentang pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Catatan

Ditetapkan di Pangkalpinang, tanggal 31 Desember 2024. Berlaku Pada Tanggal Diundangkan.